

BAB III

Deskripsi Lokasi Bencana dan Lembaga Pemerintah

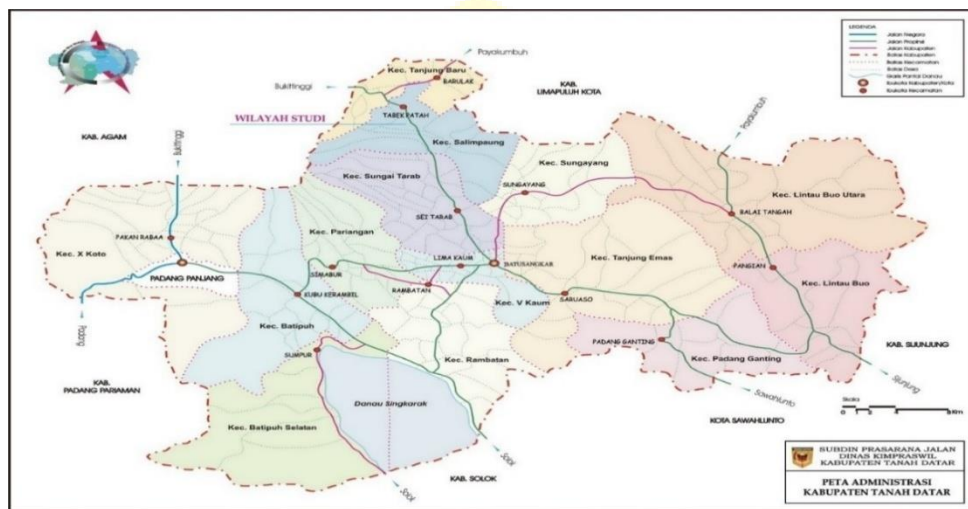
3.1 Deskripsi Lokasi bencana

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam Provinsi Sumatra Barat, Indonesia, dengan ibu kota Batusangkar $0^{\circ}27'12''\text{S}$ $100^{\circ}35'38''\text{E}$. Kabupaten ini merupakan kabupaten terkecil kedua untuk luas wilayahnya di Sumatra Barat, yaitu 133.600 Ha (1.336 km²). Ibukota Kabupaten Tanah Datar yaitu Kota Batusangkar, yang memiliki keunikan karena melintasi tiga wilayah kecamatan sekaligus, meliputi Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Tanjung Emas, dan Kecamatan Sungai Tarab. Pusat administrasi pemerintahannya sendiri berlokasi di Kecamatan Tanjung Emas, tepatnya di Nagari Pagaruyung. Kota Batusangkar sering disebut sebagai Kota Budaya, mengingat Kabupaten Tanah Datar menyimpan banyak warisan sejarah dan prasasti, terutama Istana Basa Pagaruyung yang menjadi pusat Kerajaan Minangkabau (<https://tanahdatar.go.id/>).

Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah agraris, lebih 70% penduduknya bekerja pada sektor pertanian, baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, maupun peternakan *Local Governance Support Program* (LGSP) (2010). *Luhak Nan Tuo*, nama lain dari Kabupaten Tanah Datar, saat ini di Kabupaten Tanah Datar masih banyak terdapat peninggalan sejarah seperti prasasti atau batu bersurat terutama peninggalan zaman Adityawarman.

Secara geografis wilayah Kabupaten Tanah Datar terletak di tengah-tengah Provinsi Sumatra Barat, yaitu pada $00^{\circ}17''\text{LS}$ $-00^{\circ}39''\text{LS}$ dan $100^{\circ}19''\text{BT}$ $-100^{\circ}51''\text{BT}$ (3). Batas Wilayah Kabupaten Tanah Datar memiliki perbatasan dengan beberapa kabupaten/kota di Sumatra Barat, yaitu: Utara berbatasan dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota Timur berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung. Selatan berbatasan dengan Kota Sawahlunto dan Kabupaten Solok . Barat berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman.

3.1 Gambar Peta Wilayah Kabupaten Tanah Datar



Diantara seluruh Kecamatan yang ada, 3 Kecamatan terletak pada ketinggian antara 750 s.d. 1000 meter di atas permukaan laut, yaitu Kecamatan X Koto, Salimpaung, dan Tanjung Baru. Sementara itu empat Kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Lima Kaum, Tanjung Emas, Padang Ganting, dan Sungai Tarab terletak pada ketinggian 450 s.d. 550 meter dari permukaan laut. Sedangkan 7 Kecamatan lagi terletak pada ketinggian yang bervariasi, misalnya Kecamatan Lintau Buo yang terletak pada ketinggian antara 200 s.d. 750 meter dari permukaan laut. Jika dilihat dari luas wilayah Kecamatan, maka Kecamatan yang paling kecil luasnya adalah Kecamatan Lima Kaum dengan luas 50,00 Km², sedangkan Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Lintau Buo Utara, yakni 204,31 Km², kemudian diikuti

Kecamatan X Koto yang luasnya 152,02 Km² (<https://tanahdatar.go.id/>).

Topografi Kabupaten Tanah Datar terletak di antara dua gunung, yaitu Gunung Merapi dan Gunung Singgalang. Kondisi topografi ini didominasi oleh daerah perbukitan, serta memiliki dua pertiga bagian danau Singkarak. Kondisi topografis Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut:

- a. Wilayah Datar 0–3% dengan luas 6.189 Ha atau 6.63% dari luar wilayah Kabupaten Tanah Datar.
- b. Wilayah Berombak 3–8% dengan luas 3.594 Ha atau 2,67% dari luar wilayah Kabupaten Tanah Datar.
- c. Wilayah Bergelombang 8-15% dengan luas 43.922 Ha atau 32.93% dari luas Kabupaten Tanah Datar.
- d. Kemiringan di atas 15% dengan luas wilayah 79.895 Ha atau 59.77% dari luas Kabupaten Tanah Datar (<https://tanahdatar.go.id/>).

Iklim secara umum iklim di kawasan Kabupaten Tanah Datar adalah sedang dengan temperatur antara 12 °C–25 °C dengan curah hujan rata-rata lebih dari 3.000 mm per tahun. Hujan kebanyakan turun pada bulan September hingga bulan Februari. Curah hujan yang cukup tinggi ini menyebabkan ketersediaan air cukup, sehingga memungkinkan usaha pertanian secara luas dapat dikembangkan. Hidrologi Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah yang kaya dengan sumber air. Selain Danau Singkarak, di Kabupaten Tanah Datar terdapat lebih dari 25 buah sungai. Namun, curah hujan yang tinggi juga menyebabkan bencana yang sering terjadi di Kabupaten Tanah Datar, seperti tanah longsor, jalan amblas, dan bahkan banjir bandang.

Kecamatan berikut adalah daftar kecamatan dan nagari di Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat, Indonesia. Kabupaten Tanah Datar memiliki 14 kecamatan dan 75 desa atau nagari. Luas wilayahnya mencapai 1.336,10 km² dan penduduk 383.676 jiwa (2023) dengan sebaran 274 jiwa/km² (<https://tanahdatar.go.id/>).

Tabel 3.1 Daftar kecamatan dan nagari di Kabupaten Tanah Datar

NO	KECAMATAN	NAGARI
1	X Koto	Aie Angek, Jaho, Koto Baru, Koto Laweh, Pandai Sikek, Paninjauan, Panyalaian, Singgalang, Tambangan
2	Batipuh	Andaleh, Batipuh Ateh, Batipuh Baruah, Bungo Tanjuang, Gunuang Rajo, Pitalah, Sabu, Tanjuang Barulak
3	Batipuh Selatan	Batu Taba, Guguak Malalo, Padang Laweh Malalo, Sumpur
4	Lima Kaum	Baringin, Cubadak, Labuh, Limo Kaum, Parambahan
5	Lintau Buo	Buo, Pangian, Taluak, Tigo Jangko
6	Lintau Buo Utara	Balai Tengah, Batu Bulek, Lubuak Jantan, Tanjuang Bonai, Tepi Selo
7	Padang Ganting	Atar, Padang Ganting
8	Pariangan	Batu Basa, Pariangan, Sawah Tengah, Simabur, Sungai Jambu, Tabek
9	Rambatan	III Koto, Balimbing, Padang Magek, Rambatan, Simawang
10	Salimpaung	Lawang Mandahiling, Salimpaung, Situmbuk, Sumanik, Supayang, Tabek Patah

11	Sungai Tarab	Gurun, Koto Baru, Koto Tuo, Kumango, Padang Laweh, Pasie Laweh, Rao Rao, Simpuruik, Sungai Tarab, Talang Tangah
12	Sungayang	Andaleh Baruh Bukik, Minangkabau, Sungai Patai, Sungayang, Tanjung
13	Tanjung Baru	Barulak, Tanjuang Alam
14	Tanjung Emas	Koto Tangah, Pagaruyung, Saruaso, Tanjung Barulak

Sumber : Website resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar

3.2 Gambaran Umum Lokasi Rawan Bencana

Menurut BPBD Kabupaten Tanah Datar, wilayah Tanah Datar memiliki beberapa kecamatan yang rentan terhadap bencana longsor tanah akibat faktor alam dan aktivitas manusia. Beberapa penyebab utama longsor di daerah ini termasuk curah hujan yang tinggi, topografi lereng yang terjal, kondisi geologi yang rentan, perubahan penggunaan lahan, aktivitas manusia, guncangan eksternal, dan drainase yang buruk. Curah hujan yang intens, mencapai 70-100 mm per hari, membuat tanah menjadi jenuh, sehingga mengurangi stabilitas lereng. Lereng yang curam, dengan kemiringan lebih dari 45 derajat, lebih mudah mengalami longsor karena gravitasi. Jenis tanah yang tidak padat dan adanya lapisan impermeabel juga berdampak negatif pada kestabilan lereng (<https://bnpb.go.id/>).

Perubahan penggunaan lahan dari hutan menjadi pemukiman atau pertanian yang tidak terkelola mengurangi vegetasi yang menahan tanah dan air. Aktivitas lain, seperti pembangunan tanpa manajemen saluran air yang baik, semakin meningkatkan risiko longsor (Olga, 2025). Kecamatan seperti Rambatan, Lintau Buo, dan Lintau Buo Utara memiliki karakteristik yang membuatnya sangat rentan terhadap longsor, terutama saat musim hujan. Tanpa langkah mitigasi, seperti pengelolaan saluran air dan

penghijauan, longsor dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur dan membahayakan keselamatan warga.

Bukan hanya tanah longsor wilayah sekitar Gunung Marapi di Tanah Datar sangat rentan terhadap bencana banjir lahar dingin akibat posisi geografisnya yang terletak di lereng dan sepanjang aliran sungai yang bersumber dari Gunung Marapi (Setyaningrum, 2024). Banjir lahar dingin ini muncul ketika material vulkanik dari gunung bercampur dengan hujan deras, mengalir dengan cepat ke daerah bawah yang biasanya terdiri dari pemukiman dan lahan pertanian. Situasi ini mengakibatkan aliran lahar dingin mengangkut material berat seperti pasir, batu, dan abu yang sangat menghancurkan infrastruktur, rumah, dan sarana lainnya.

Daerah Kabupaten Tanah Datar yang terletak kurang lebih 300 meter dari tepi sungai yang bersumber dari Gunung Marapi menunjukkan risiko tinggi, mencakup area seluas sekitar 27.480 hektar. Wilayah-wilayah seperti Kecamatan Pariangan, Lima Kaum, Sungai Tarab, Salimpaung, dan Tanjung Baru menghadapi risiko yang bervariasi, yaitu sedang hingga tinggi, terkait dengan ancaman banjir lahar dingin tersebut (Septiawan, 2025).

Banjir ini seringkali menyebabkan kerusakan pada jembatan, rumah penduduk, fasilitas umum, serta menimbulkan korban jiwa dan kerugian yang signifikan, seperti yang terjadi pada bencana banjir lahar dingin Gunung Marapi tahun 2024, di mana banyak rumah dan jembatan yang hancur, serta terdapat korban meninggal dan hilang yang tercatat di Tanah Datar. Masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai yang bersumber dari Gunung Marapi perlu tetap waspada, karena ancaman bencana ini selalu ada, terutama saat musim hujan dengan intensitas curah hujan yang tinggi. Banjir lahar dingin masih menghantui masyarakat disetiap curah hujan mulai meningkat, hal ini terjadi karena gunung Marapi masih terus erupsi hingga sekarang. Jadi diharapkan pemerintah terus melakukan pengembangan mitigasi bencana seperti pembangunan sabo dam dan infrastruktur pendukung berdasarkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah

Datar yang mengatur tentang mitigasi bencana adalah Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana.

3.2.1 Lokasi terdampak bencana banjir lahar dingin

Banjir lahar dingin yang terjadi pada Mei 2024 di sekitar Gunung Marapi telah memberikan dampak besar pada beberapa kabupaten dan kota di Sumatra Barat, terutama Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Padang Pariaman. Aliran lahar dingin yang dipicu oleh hujan intensitas tinggi ini membawa material vulkanik yang menghanyutkan rumah-rumah warga, jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya di sepanjang aliran sungai berhulu gunung tersebut (Tempo.co, 2024).

Terdapat 2 Kabupaten yang mengalami kerusakan cukup parah, yaitu Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar. Di Kabupaten Agam, beberapa nagari seperti Bukik Batabuah, Sungai Pua, dan Balai Garuah mengalami dampak signifikan. Lahar dingin menghantam pemukiman penduduk dan area pertanian, langsung menyebabkan kerusakan berat. Sedangkan Kabupaten Tanah Datar, beberapa nagari seperti Nagari Aia Angek di Kecamatan X Koto, Nagari Sabu di Kecamatan Batipuh, Nagari Sungai Jambu di Kecamatan Pariangan, Nagari Batu Basa, Nagari Koto Baru, Nagari Pariangan, Kecamatan Lima Kaum mengalami kerusakan yang sangat signifikan juga. Seperti contohnya pada akses air bersih, karena banjir lahar dingin ini mengancam kesehatan masyarakat di sekitar aliran sungai yang terdampak. Pemerintah daerah berusaha melakukan tanggap darurat dan perbaikan infrastruktur terutama sarana jalan dan jembatan agar akses dapat segera pulih kembali (<https://bnpb.go.id/>).

Karena wilayah Tanah Datar hampir seluruhnya terdampak menyebabkan wilayah Tanah Datar lumpuh untuk beberapa hari pascabencana, hal ini bisa dilihat dari kondisi lalu lintas antar nagari. Masyarakat harus mencari jalan alternatif untuk berpindah dari nagari

ke nagari lainnya . Secara keseluruhan, informasi menunjukkan bahwa bencana alam pada 11 Mei 2024 mengakibatkan kerusakan parah pada jembatan di seluruh kecamatan yang terdampak di Kabupaten Tanah Datar, serta kerusakan pada fasilitas ibadah dan infrastruktur pendukung lainnya (Islami & Wialdi, 2025). Situasi ini membutuhkan tindakan dan perbaikan yang segera untuk mengembalikan fungsi infrastruktur serta kehidupan masyarakat di Kabupaten Tanah Datar.

Tabel 3.2. Daftar infrastruktur yang terdampak banjir lahar dingin 2024

NO	FASILITAS UMUM	JUMLAH
1	Fasilitas Kesehatan	1 Unit
2	Fasilitas Pendidikan	1 Unit
3	Masjid/Musholla/Tempat ibadah	18 Unit
4	Jembatan	26 Unit
5	Jalan Raya	4 unit
6	Irigasi/Bendungan	103 Unit
7	PAMSIMAS	22 Unit
8	Kantor Lembaga	3 Unit

Sumber : Website Resmi BPBD Kabupaten Tanah Datar

Kecamatan X Koto yang luasnya 152.02 km² menjadi kecamatan terdampak paling parah. Hal ini karena Kecamatan X Koto berada di kaki Gunung Singgalang dan Gunung Marapi. Faktor inilah yang menyebabkan tingginya jumlah korban jiwa serta banyaknya fasilitas rusak. Bahkan laporan pertama kali yang diterima oleh pihak BPBD Tanah Datar berada di Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto pada jam 21;00 WIB (Septiawan, 2025).

Kecamatan X Koto merupakan daerah yang sangat terdampak, di mana tiga jembatan utama mengalami kerusakan serius, yaitu Jembatan Taweh, Jembatan Berok, dan Jembatan Katiagan. Selain itu, sejumlah musholla dan masjid di Nagari Paninjauan serta Pandai Sikek juga

mengalami kerusakan dalam tingkat ringan hingga sedang, yang mengganggu kegiatan ibadah masyarakat. Kecamatan X Koto adalah kecamatan yang mengapit Kota Padang Panjang, aliran yang datang menuju Padang Panjang adalah aliran yang berasal dari Kecamatan X Koto yang berhulu di Gunung Singgalang dan Gunung Marapi. Nagari Singgalang melaporkan bahwa jembatan *lubuak mato kuciang* dan berbagai fasilitas umum lainnya yang penting bagi kehidupan sehari-hari mengalami kerusakan parah. Jembatan lubuk mata kucing adalah jembatan penghubung Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar. Akibat dari putus nya jembatan ini masyarakat tidak bisa lagi ke pasar Padang Panjang untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

Di Nagari Koto Laweh, kerusakan jembatan terlihat sangat parah, termasuk jembatan tanjung pintu rangkuangan, lurah aia kalek, serta beberapa jembatan lainnya yang semuanya mengalami kerusakan yang serius. Infrastruktur lainnya, termasuk jalan dan fasilitas umum, juga berpengaruh, sehingga menambah kesulitan dalam proses pemulihan daerah ini (Prasetio, 2025). Nagari Panyalaian juga mengalami dampak signifikan akibat kerusakan serius pada jembatan *aie tajun*, bersamaan dengan beberapa tempat ibadah yang mengalami kerusakan ringan. Di Kecamatan X Koto juga ada jalan nasional yang terdampak yaitu jalan lembah anai yang menyebabkan akses dari kota Padang menuju Bukittinggi, Payakumbuh, Pekanbaru, dan lainnya harus dialihkan ke jalan malalak yang dikenal cukup curam.

Gambar 3.2 Kondisi Nagari Panyalaian Pascabencana 2024



Sumber : Data Dinas PUPR

Berbeda dengan Kecamatan X koto yang terdampak karena berada di kaki Gunung Marapi dan Gunung Singgalang, Kecamatan Batipuh terdampak hanya karena berada di kaki Gunung Marapi. Di Kecamatan Batipuh, ada dua jembatan utama yang sangat rusak, yakni jembatan kandang panjang dan jembatan Sungai Maruok. Kerusakan ini tidak hanya menghalangi akses antara area, tetapi juga mengganggu kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Nagari Andaleh juga mengalami kerusakan serius pada jembatan andaleh serta beberapa infrastruktur lainnya, yang dapat mengganggu transportasi dan distribusi barang-barang kebutuhan pokok. Irigasi dan aliran sungai menjadi infrastruktur yang paling terdampak di kecamatan ini.

Gambar 3.3 Kondisi Nagari Andaleh Pascabencana 2024



Sumber : Data Dinas PUPR

Di Kecamatan Pariangan, terdapat beberapa jembatan seperti rona toluak dan pulau yang semuanya mengalami kerusakan berat. Tempat ibadah seperti Musholla MTsN 7 Tanah Datar di sungai jambu juga mengalami kerusakan parah hingga hancur, menandakan perlunya perhatian lebih dalam pemulihan fasilitas sosial. Akibat banjir lahar dingin yang melanda MTsN 7 Tanah Datar, sekolah ini harus dialihkan karena berada tepat di bibir sungai. Begitupun dengan beberapa musholla yang terdampak harus dipindahkan pembangunan ke daerah yang aman dari bencana banjir lahar dingin. Di Nagari Sungai Jambu sebenarnya juga bisa dikategorikan daerah yang terdampak cukup parah, karena masyarakat di daerah ini suka membuat bangunan dan beraktifitas di pinggir sungai yang menjadi aliran air dari gunung

marapi menuju Danau Singkarak.

Gambar 3.4 Kondisi Nagari Sungai Jambu Pascabencana 2024



Sumber : Data Dinas PUPR

Kecamatan Lima Kaum menjadi daerah yang terdampak karena berdekatan dengan Nagari Sungai Jambu. Nagari Lima Kaum terdampak banjir lahar dingin yang mengakibatkan kerusakan parah pada jembatan-jembatan seperti *tigo niniak* dan kubu manganiang. Beberapa tempat ibadah dan fasilitas pendidikan juga tercatat mengalami kerusakan serius, yang bisa berdampak pada kegiatan pendidikan, keagamaan dan sosial masyarakat. Terdapat jembatan rusak di Nagari Lima Kaum yang merupakan akses dari kota Padang Panjang menuju Batusangkar atau pusat Kabupaten Tanah Datar.

Jembatan ini harus segera diperbaiki oleh pemerintah karena jalan atau jembatan penghubung Kabupaten dan Kota adalah nadi kehidupan masyarakat. Karena bantuan pascabencana juga masuk melalui jalan penghubung tersebut, sedangkan untuk fasilitas umum selain jembatan itu hanya mengalami kerusakan ringan dan sedang. Yang paling parah terdampak di Kecamatan Lima Kaum adalah wilayah pertanian masyarakat dan juga peternakan masyarakat kerusakan ringan. Tetapi di kecamatan ini juga banyak ditemukan korban jiwa yang terbawa arus dari Nagari Sungai Jambu.

Gambar 3.5 Kondisi Nagari Lima Kaum Pasca Bencana 2024



Sumber : Data Dinas PUPR

Kecamatan Rambatan adalah kecamatan terakhir dari aliran sungai Gunung Marapi ke Danau Singkarak, Kecamatan Rambatan mengalami kerusakan pada jembatan panti, yang merupakan akses penting bagi warga. Jembatan ini juga menghubungkan Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten/Kota lainnya. Kerusakan ini mengganggu pergerakan dan memerlukan perbaikan segera agar aktivitas dapat kembali normal. Banjir lahar dingin merusak irigasi, jembatan, lahan pertanian, fasilitas air bersih hingga puluhan rumah warga. Setelah bencana, banyak orang terpaksa meninggalkan rumah mereka, infrastruktur yang mengalami kerusakan yang mengganggu kegiatan sehari-hari masyarakat dan akses ke layanan sosial termasuk pendidikan dan perawatan kesehatan. Yang paling terasa adalah konsekuensi ekonomi, khususnya degradasi lahan dan penghancuran aset ekonomi masyarakat yang mengandalkan tanah sebagai sumber penghidupan mereka. Hilangnya pendapatan dan kerusakan finansial yang besar berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat nagari di kecamatan ini.

Selain jalan dan jembatan, beberapa area irigasi dan tempat ibadah juga mengalami kerusakan yang parah. Irigasi mengalami kerusakan paling banyak, yang membuat pengairan pertanian di daerah menjadi sulit. Daerah pertanian juga menjadi salah satu yang

terdampak paling parah karena material yang terbawa banjir bandang mengendap di area persawahan. Tempat-tempat ibadah seperti masjid, musholla, dan surau juga terkena dampak galodo, dengan banyak bangunan yang mengalami kerusakan dari tingkat ringan hingga berat, termasuk beberapa di antaranya yang rusak total. Untuk fasilitas kesehatan, lembaga, dan PAMSIMAS (Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) juga banyak yang terdampak yang mengakibatkan pelayanan kesehatan menjadi terganggu. Data tersebut memberikan informasi bahwa banjir lahar dingin telah menyebabkan dampak fisik yang luas dan signifikan terhadap infrastruktur dasar serta fasilitas umum di Kabupaten Tanah Datar. Kerusakan ini bisa mengganggu aksesibilitas, kegiatan sosial, dan pertanian masyarakat di area yang terdampak.

Menurut Bupati Eka Putra, lebih dari 70% penduduk Kabupaten Tanah Datar bekerja dibidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan sehingga bergantung pada kondisi alam. Ia mengatakan, meskipun demikian, bahwa bencana yang dimulai dengan letusan Gunung Marapi pada bulan Desember 2023 dan berlanjut hingga banjir yang dahsyat, pada Mei 2024 mengakibatkan gagal panen dan kerusakan di tanah pertanian dan kebun masyarakat. Menurut data dari Departemen Pertanian, 511,52 hektar lahan pertanian telah dirusak oleh bencana, oleh karena itu tindakan segera diperlukan untuk memulihkan industri pertanian yang terdampak .

Para penduduk setempat telah mengalami penderitaan yang besar akibat banjir lahar dingin yang melanda Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 11 Mei 2024. Diperkirakan 32 orang tewas, 10 orang hilang , dan 26 orang terluka. Selain itu, 43 rumah tersapu banjir dan mengalami kerusakan, 153 rumah mengalami kerusakan ringan hingga berat, dan 36 jembatan hancur. Sebanyak 124 unit saluran irigasi yang tidak beroperasi juga terdokumentasi. Material longsor mengubur

ratusan hektar kolam ikan dan lahan pertanian milik warga. Lebih dari 200 mobil roda dua dan empat milik warga juga dilaporkan hilang, dan sekitar 15.032 ekor ternak dilaporkan hanyut (<https://bnpb.go.id/>).

3.3 Lembaga Pemerintah Dalam Kebijakan Pascabencana

Lembaga pemerintah memainkan peran sentral dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pascabencana di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, terutama setelah bencana banjir bandang dan tanah longsor di tahun 2024. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerah untuk percepatan pemulihan. Keterlibatan para pihak dalam pelaksanaan rencana aksi di tingkat daerah dibagi menjadi 2 komponen, yaitu pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di masyarakat (Monardo, 2024).

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya. Pemerintah Daerah bertanggungjawab mengalokasikan dana dan menyediakan dana penanggulangan bencana dalam APBD secara memadai untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana, pada setiap tahap pra bencana, tanggap darurat dan pascabencana. Pemerintah wajib melindungi masyarakat dari ancaman dan dampak bencana (Peraturan Kepala BNPB, 2008).

a. Bupati (Kepala Daerah) sebagai penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya. Tugas dan wewenang kepala daerah saat terjadi bencana dan pascabencana adalah:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana.
2. Menentukan status dan tingkatan keadaan darurat bencana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Mengarahkan seluruh potensi/semua daya yang ada di wilayahnya untuk mendukung penyelenggaraan

penanggulangan bencana.

4. Menjalin kerjasama dengan daerah lain atau pihak-pihak lain guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana.
5. Mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman yang beresiko menimbulkan bencana.
6. Mencegah dan mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayah kewenangannya.
7. Mengangkat seorang komandan penanganan darurat bencana atas usul Kepala BPBD.
8. Melakukan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang atau barang serta jasa lain (misalnya relawan) yang diperuntukkan untuk penanggulangan bencana di wilayahnya, termasuk pemberian izin pengumpulan sumbangan di wilayahnya.
9. Menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya (Peraturan Kepala BNPB, 2008).

b. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Tugas dan wewenangnya saat terjadi bencana dan pascabencana adalah:

1. Bekerja sama dengan bupati menyusun dan menetapkan peraturan daerah dalam penanggulangan bencana (Peraturan Kepala BNPB, 2008).

c. BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) tugas dan fungsinya adalah:

1. Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Dipimpin kepala bidang untuk membantu kepala pelaksana dalam perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini pada pra bencana serta pemberdayaan

masyarakat dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengurangan resiko bencana. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat (Peraturan Kepala BNPB, 2008).

2. Bidang kedaruratan dan logistik. Bertugas melakukan koordinasi dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan segera prasarana dan sarana vital. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait lainnya di bidang kedaruratan dan logistik (Peraturan Kepala BNPB, 2008).

3. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Fokus mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Fungsi bidang ini adalah untuk merumuskan kebijakan penanggulangan bencana pada pasca bencana. Pelaksanaan penyusunan program atau perencanaan teknis, pengelolaan data dan pengawasan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama teknis dengan instansi atau lembaga terkait lainnya seperti pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan publik, pelayanan utama dalam masyarakat pada pasca bencana. Pengkoordinasian dan

pelaksanaan perencanaan teknis kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana umum pasca bencana. (Peraturan Kepala BNPB, 2008).

- d. Dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan OPD lainnya. Dinas PUPR bertindak sebagai *leading sector* teknis dengan wewenang merancang dan melaksanakan rehabilitasi infrastruktur kritis seperti jalan, jembatan, drainase, dan irigasi yang rusak akibat bencana. Tugas utamanya meliputi inventarisasi kerusakan, penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), pengajuan anggaran ke Kementerian PUPR, serta pengawasan pelaksanaan proyek untuk memastikan standar ketahanan bencana. Bappeda berperan dalam perencanaan strategis jangka menengah, termasuk integrasi data kerusakan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), evaluasi efektivitas rekonstruksi, dan alokasi anggaran lintas sektor untuk fasilitas sosial seperti sekolah dan puskesmas. Serta OPD lainnya ikut membantu sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

UIN IMAM BONJOL
PADANG